BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai efektivitas unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) dalam menerapkan sistem informasi pengelolaan surat tanda motor kendaraan (STNK) di Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, sebagai berikut:

1. Tujuan UPPD dalam penerapan Sistem Informasi pengelolaan STNK di Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, belum berjalan dengan baik hal ini ditambah dengan belum adanya dukungan sarana-prasarana yang memadai seperti dana yang besar untuk menggali dan mengembangkan SDM karena SDM inilah merupakan prioritas utama, sebab apabila meningkatnya SDM aparatur maka pencapaian tujuan dapat tercapai dengan baik. Akan tetapi pencapaian tujuan dari p belum tercapai.
2. Strategi UPPD dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan STNK di Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran merupakan agenda rutin dengan sasaran peningkatan kualitas informasi pengelolaan STNK yang ditujukan kepada masyarakat, ada beberapa faktor pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan STNK yaitu SDM, infrastruktur dan pembiayaan. Namun faktor pendukung sepenuhnya belum terpenuhi oleh UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran.

3. Kebijakan UPPD dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan STNK di Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran yang diterapkan memerlukan landasan atau peraturan-peraturan jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan penggunaan sistem informasi pengelolaan STNK, karena selama ini masih mengacu pada Keputusan Menteri. Peraturan-peraturan mengenai sistem informasi pengelolaan STNK ini belum ada yang khusus untuk mengaturnya.
4. Perencanaan UPPD dalam penerapan Sistem Informasi STNK di Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran direncanakan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. dalam rangka guna mendukung kerja pegawai dan kegiatan awal operasional akan tetapi penyusunan rencana dan tujuan yang telah dibuat belum sepenuhnya tercapai.
5. Program UPPD dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan STNK di Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran belum terarah dan teratur, karena program penyusunan kebijakan, program pengembangan infrastruktur, program peningkatan kompetensi SDM dan program pengelolaan belum terbina dengan baik. Sehingga penyusunan program yang dilakukan oleh UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran belum berjalan optimal.
6. Sarana dan prasarana UPPD dalam penerapan Sistem Informasi STNK di Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran untuk menunjang pelaksanaan penerapan sistem informasi pengelolaan STNK diperluakan biaya awal yang besar guna pengembangan sistem informasi. Dikarenakan kurangnya biaya untuk membiayai penerapan sistem informasi pengelolaan STNK, Maka dari

itu UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran mengenai saran dan prasarana belum terpenuhi.

7. Sistem pengawasan UPPD dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan STNK di Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran diperlukan adanya tahapan mengenai pengawasan dari pimpinan yaitu penerimaan laporan, pemantauan dan evaluasi. Sehingga adanya tahapan pengawasan akan dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penerapan sistem informasi pengelolaan STNK dalam memberikan informasi STNK kepada masyarakat. Namun peran dari pimpinan untuk pemantauan dan evaluasi belum berjalan efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba memberikan saran yang kiranya dapat diterima dan bermanfaat bagi efektivitas unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) dalam menerapkan sistem informasi pengelolaan surat tanda motor kendaraan (STNK) di Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, sebagai berikut :

1. Melihat dari tujuan sistem informasi pengelolaan STNK ingin mengembangkan SDM aparatur dan meningkatnya pelayanan, maka UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran harus memberikan suatu program untuk peningkatan SDM seperti melaksanakan dan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan sistem informasi STNK

melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, lokakarya, seminar maupun kursus-kursus.

2. Adanya Strategi sistem informasi pengelolaan STNK di UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran diperlukan faktor pendukung dengan penyediaan SDM sebagai sarana pengguna sistem informasi pengelolaan STNK, infrastruktur dengan menyediakan sarana penunjang dalam penerapan sistem informasi pengelolaan STNK dan biaya yang berkelanjutan. Maka ketiga faktor inilah yang dijadikan fokus utama oleh UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran agar terealisasi dengan baik strategi yang telah dibuat.
3. Mengingat penggunaan sistem informasi pengelolaan STNK dalam memberikan informasi mengenai STNK merupakan suatu agenda dan program kerja di UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, maka aparatur yang menangani bidang tersebut diberikan pemahaman dan pengarahan akan arti pentingnya peningkatan SDM, supaya dalam pelaksanaan ke depannya menjadi lebih baik dan sempurna dari sebelumnya dalam hal memberikan informasi mengenai STNK.
4. Berkaitan dengan adanya sistem informasi pengelolaan STNK di UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, hendaknya aparatur yang berwenang selalu mengevaluasi dan memonitor perkembangan sistem informasi pengelolaan STNK.

5. Untuk memperlancar pelaksanaan proses penerapan sistem informasi pengelolaan STNK, hendaknya UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran melakukan sosialisasi tentang pengelolaan STNK sebanyak-banyaknya agar sistem informasi pengelolaan STNK yang ada di UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran dapat diketahui oleh masyarakat.
6. Untuk berjalannya sistem informasi pengelolaan STNK di UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran dengan baik, hendaknya membudayakan komputer dikalangan seluruh aparatur harus lebih ditingkatkan agar penggunaan sistem informasi pengelolaan STNK dapat dilakukan secara professional.
7. Dalam rangka untuk meningkatkan SDM hendaknya para aparatur di UPPD Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran mengikuti pelatihan-pelatihan yang terprogram dan terstruktur sesuai dengan keahliannya.